

**Peran Dana Desa Dalam Mengurangi Kemiskinan Dan Meningkatkan Inklusi Sosial Pada
Petani Penggarap Desa Aka-Akae Kabupaten Sidenreng Rappang**

***The Role Of Village Funds In Reducing Poverty And Increasing Social Inclusion Of Farmers
In Aka-Akae Village, Sidenreng Rappang Regency***

¹Afrah Namirah Kamal

afrahn timerah1803@gmail.com

Universitas Ichsan Sidenreng Rappang

²Romi Nugraha JS

romynugraha7@gmail.com

Universitas Ichsan Sidenreng Rappang

³Muhammad Taufiq

my.taufiq091@gmail.com

Universitas Ichsan Sidenreng Rappang

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran dana desa dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi sosial serta mencari tahu faktor pendukung dan penghambatnya pada petani penggarap di Desa Aka-Akae Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode penelitian ini adalah kualitatif pendekatan fenomenologi dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun penentuan informan melalui *purposive sampling* serta *snowball sampling*. Teori yang digunakan adalah teori *welfare state* yaitu negara bertanggungjawab atas kesejahteraan warga negaranya. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penggunaan dana desa dalam mengurangi kemiskinan di Desa Aka-Akae yang terdiri dari empat program yaitu penyuluhan pupuk organik disertai sosialisasi, bantuan beras 10 kg, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut masih menuai respons yang kurang baik dari petani penggarap miskin karena kurang efektif mengeluarkan petani dari jerat kemiskinan. Selain itu, peran dana desa dalam meningkatkan inklusi sosial juga belum efektif karena petani penggarap masih tereksklusifkan karena kurangnya keterlibatan aktif petani penggarap dalam Musrembang, kurangnya program pemberdayaan untuk perempuan, dan kurangnya keterlibatan perempuan dalam Musrembang.

Kata kunci : Dana Desa, Kemiskinan, Inklusi Sosial, Petani Penggarap

ABSTRACT

The aim of writing this thesis is to determine the role of village funds in reducing poverty and increasing social inclusion as well as finding out the supporting and inhibiting factors for sharecroppers in Aka-Akae Village, Sidenreng Rappang Regency. This research method is a qualitative phenomenological approach with data collection techniques by means of interviews, observation and documentation. The informants were determined through purposive sampling and snowball sampling. The theory used is the welfare state theory, namely that the state is responsible for the welfare of its citizens. This research shows the results that the use of village funds in reducing poverty in Aka-Akae Village consists of four programs, namely organic fertilizer education accompanied by outreach, 10 kg rice assistance, and Direct Cash Assistance (BLT), these four things still receive a poor response from poor sharecroppers because they have not been able to get farmers out of the trap of poverty. Apart from that, the role of village funds in increasing social inclusion is also not effective because sharecroppers are still excluded due to the lack of active involvement of sharecroppers in Musrembang, lack of empowerment programs for women, and lack of women's involvement in Musrembang.

Keywords: Village Funds, Poverty, Social Inclusion, Tenant Farmers

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang merupakan negara penghasil bahan pangan dalam jumlah yang besar karena sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Indonesia memiliki lahan pertanian cukup luas. Sekitar 191,09 juta Ha adalah luas daratan Indonesia dan lahan untuk pertanian tersedia seluas 70 juta Ha (Ketersediaan 2015). Fakta-fakta ini seharusnya menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan sumber daya alam yang dapat membantu rakyatnya, terutama penduduk perdesaan agar hidupnya lebih baik. Ironisnya, tingkat kemiskinan di masyarakat desa masih cukup tinggi. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya nyatanya mempunyai 25,90 juta jiwa penduduk yang tergolong miskin (Badan Pusat Statistik, 2023). Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari 11,74 juta jiwa di perkotaan dan 14,16 juta jiwa di perdesaan.

Menurut data yang dirilis oleh BPS sebanyak 31,53 % Rumah Tangga (RT) miskin menggantungkan hidupnya atau sumber mata pencaharian utama dari sektor pertanian (Badan Pusat Statistik, 2022). Melihat data tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan petani yang tinggal di perdesaan jelas berbanding terbalik dengan luas lahan pertanian Indonesia. Sehingga tujuan pendirian Negara Republik Indonesia yang pada dasarnya untuk menyejahterakan seluruh rakyat tanpa terkecuali nyatanya berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, khususnya bagi para petani. Peran pemerintah dalam hal mengentaskan kemiskinan tidak sejalan dengan teori *Welfare State* (negara kesejahteraan) yang merupakan ideologi yang termaktub di dalam Pancasila dan UUD 1945. *Welfare State* sendiri merupakan konsep pemerintahan demokratis dimana negara dalam hal ini mempunyai keharusan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyatnya, berdasarkan atas prinsip-prinsip kesempatan yang sama, distribusi kekayaan yang adil dan tanggung jawab dari publik terhadap warga negara yang hidupnya masih memprihatinkan agar mempunyai kehidupan yang layak dan lebih baik.

Kemiskinan disebabkan oleh sejumlah masalah yang menghambat kesejahteraan petani. Pertama, jumlah tanggungan keluarga akan menyebabkan pendapatan yang terbatas lebih dahulu digunakan untuk kebutuhan konsumsi pangan sehingga mengesampingkan kebutuhan non pangan dalam hal ini usaha dan investasi. Kedua, usia petani yang rata-rata cenderung tua dan sangat berpengaruh pada produktivitas sektor pertanian Indonesia, sebab petani berusia tua biasanya cenderung sangat konservatif (memelihara) menyikapi perubahan terhadap inovasi teknologi. Ketiga, pinjaman modal atau kredit yang harus ia kembalikan setelah musim panen. Keempat, mayoritas petani adalah petani yang luasnya > 0,5 Ha atau status kepemilikan lahan adalah milik orang lain, sehingga hidupnya sangat tergantung pada hasil sawahnya yang sedikit atau kepada pemilik sawah yang mempekerjakannya (Mandang et al., 2020).

Kabupaten Sidenreng Rappang atau yang akrab dengan nama Sidenreng Rappang terletak antara 3°43'-4°09' Lintang Selatan dan 119°41'-120°10' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten ini tercatat 1.883,25 Km persegi dan topografi sebagian besar wilayah berupa dataran rendah sehingga membuat daerah tersebut sangat cocok bagi pengembangan sektor pertanian khususnya

tanaman padi. Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk salah satu daerah yang terkenal dengan julukan “Kota Beras” karena memiliki lahan pertanian padi yang luas dan subur sehingga menjadikannya sebagai salah satu sentral produksi beras terbesar di Sulawesi Selatan. Sebagian besar masyarakat Sidenreng Rappang menggantungkan hidupnya sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kabupaten ini memiliki luas panen pada bulan Maret 2023 mencapai 19.516 hektar. Akan tetapi dengan sumber daya alam yang melimpah tersebut kemiskinan masih saja menjadi masalah yang serius.

Tabel 1 Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang 2020-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
2022	15.560 jiwa	5,11 %
2021	15.250 jiwa	5,04%
2020	15.360 jiwa	5,05%

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Data BPS 2023 menunjukkan bahwa persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang kian meningkat setiap tahunnya, sehingga hal tersebut menandakan bahwa masih ada permasalahan yang terjadi pada masyarakat petani Sidenreng Rappang yang seharusnya makmur karena sumber daya alamnya yang luas namun kemiskinan masih menggerogoti wilayah tersebut. Anggaran dana desa dalam RAPBN 2022 sebesar Rp 68 triliun, besarnya jumlah dana yang diterima oleh setiap desa diharapkan mampu mewujudkan amanat undang-undang dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Salah satu tantangan besar pelaksanaan UU ini adalah bagaimana anggaran desa dapat dan digunakan secara efisien dan efektif oleh desa untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (Bappenas, 2017).

Dikutip dari situs ditjenpdp.kemendes.go.id, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito mengatakan bahwa dana desa fokus untuk memperkuat kebijakan fiskal nasional salah satunya adalah untuk menuntaskan kemiskinan. Ada 7 (tujuh) isu prioritas penggunaan dana desa dan yang menempati isu pertama adalah pengentasan kemiskinan. Sehingga menjadikan pembangunan di desa sebagai prioritas untuk mengatur keberadaan dana desa, khususnya yang berkaitan dengan penghapusan angka kemiskinan di desa-desa melalui program-program desa. Pembangunan saat ini masih banyak menggunakan model pembangunan eksklusif, sehingga ada kemungkinan terjadi eksklusi sosial atau marginalisasi sosial yang mengurangi peran masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Eksklusi sosial dikemukakan oleh Paul Francis, Rawal (dalam Prima Putra Budi Gutama, 2020) sebagai upaya yang menjadikan seseorang atau kelompok tertentu untuk tidak bisa ikut berperan dalam kehidupan sosial, baik sebagian ataupun penuh. Kelompok yang mengalami eksklusi sosial dinamai kelompok rentan. Kelompok rentan, antara lain perempuan, penduduk miskin, serta penyandang disabilitas (Bappenas, 2022). Baik kelompok rentan ataupun marginal bisa diartikan sebagai kelompok yang tidak mempunyai akses terhadap sumber daya informasi (Shaw et al., 2020).

Permasalahan yang sering terjadi dalam sektor pertanian adalah kepemilikan

lahan yang hanya dimiliki oleh segelintir tuan-tuan tanah yang menyebabkan petani kecil kesulitan meningkatkan pendapatan dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan karena harus menyewa lahan pertanian dan memodali segala kebutuhan dalam pengelolaan di lahan sewaan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari penelitian oleh (Reffi Anggun Cahyani, 2024) bahwa umumnya petani penggarap kurang mampu dan berada dibawah garis kemiskinan karena penghasilannya yang minim dan tidak menentu karena harus siap untuk menanggung segala risiko dan semua modal yang dibebankan kepadanya. Hal tersebut juga terjadi di Desa Aka-Akae dimana sebagian besar lahan persawahan dimiliki oleh individu tertentu dan individu lainnya hanya bekerja sebagai petani penggarap yang akan mengerjakan sawah para elit.

Salah satu desa di Kabupaten Sidenreng Rappang yang masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani adalah Desa Aka-Akae, petani di daerah tersebut tergolong miskin karena hanya menggarap lahan pertanian kurang dari 1 Ha sehingga penghasilannya minim dan harus membagi hasil ke pemilik tanah. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Andre Gunder Frank yaitu "ketergantungan sosial menemukan bahwa orang-orang miskin akan cenderung semakin miskin karena telah melakukan kontak hubungan dengan orang-orang kaya". Petani miskin inilah yang rawan termarginalkan atau terdiskriminasi dalam masyarakat dan masuk dalam keadaan terpinggirkan untuk mendapat akses atas keadilan, sebab bermacam kondisi keterbatasan yang mereka miliki.

Hal ini tentu tidak sejalan dengan Undang distabilitas Nomor 6 Tahun 2014, yang memberi pemerintah desa tanggung jawab untuk meningkatkan inklusi sosial. Inklusi sosial adalah proses yang memungkinkan individu atau kelompok tertentu berpartisipasi dalam kehidupan sosial (Seda, 2023). Untuk alasan inilah eksplorasi tentang efektivitas dana desa sangat penting dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi sosial. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui peran Dana Desa dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi sosial pada petani penggarap Desa Aka-Akae Kabupaten Sidenreng Rappang serta apa saja faktor yang mendukung dan menghambat peran dana desa tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Tujuannya adalah untuk menggambarkan fenomena sosial, dalam hal ini peran Dana Desa dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi sosial petani penggarap di Desa Aka-Akae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara mendalam menggunakan teknik *purposive* dan *snowball sampling* dengan delapan informan kunci seperti Sekretaris Desa, ketua Kelompok Tani dan petani penggarap miskin, serta melakukan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak optimalisasi peran Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat petani penggarap di Desa Aka-Akae dan mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Kemiskinan Petani di Desa Aka-Akae

Data BPS 2023 menunjukkan dari 25,90 juta penduduk miskin di Indonesia, 14,16 juta diantaranya adalah penduduk perdesaan yang kebanyakan berprofesi sebagai petani sehingga sektor pertanian masih dianggap pekerjaan yang berkubang dengan jerat kemiskinan. Kabupaten Sidenreng Rappang atau yang akrab dengan nama Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah yang terkenal sebagai “Kota Beras” karena memiliki lahan pertanian padi yang luas dan subur sehingga menjadikannya sebagai salah satu sentral produksi beras terbesar di Sulawesi Selatan. Sebagian besar masyarakat Sidenreng Rappang menggantungkan hidupnya sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papannya. Namun data BPS 2023 menunjukkan bahwa persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang kian meningkat setiap tahunnya, sehingga hal tersebut menandakan bahwa masih ada permasalahan yang terjadi pada masyarakat petani Sidenreng Rappang yang seharusnya makmur karena sumber daya alamnya yang luas namun kemiskinan masih menggerogoti wilayah tersebut.

Permasalahan yang sering terjadi dalam sektor pertanian adalah kepemilikan lahan yang hanya dimiliki oleh segelintir tuan-tuan tanah yang menyebabkan petani kecil kesulitan meningkatkan pendapatan dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan karena harus menyewa lahan pertanian dan memodali segala kebutuhan dalam pengelolaan di lahan sewaan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari penelitian oleh (Reffi Anggun Cahyani, 2024) bahwa umumnya petani penggarap kurang mampu dan berada dibawah garis kemiskinan karena penghasilannya yang minim dan tidak menentu karena harus siap untuk menanggung segala risiko dan semua modal yang dibebankan kepadanya. Hal tersebut juga terjadi di Desa Aka-Akae dimana sebagian besar lahan persawahan dimiliki oleh individu tertentu dan individu lainnya hanya bekerja sebagai petani penggarap yang akan mengerjakan sawah para elit. Hal ini diutarakan oleh Bapak W selaku kepala dusun sekaligus ketua kelompok tani di Desa Aka-Akae yaitu:

“Iye okkoe nak maengangi paggalung paruma daripada punnae galung sendiri, engkami kapang 20 punna galung, ko paggalung ero yawana 1 Ha engkami 52 mannuma”

(Disini nak, kebanyakan petani penggarap daripada petani pemilik lahan. Ada 20 petani pemilik lahan kalau penggarap yang dibawah 1 Ha sekitar 52 orang)

Dari hasil wawancara bersama informan Bapak W, jenis-jenis petani di Desa Aka-Akae dapat dipersentasekan sebagai berikut:

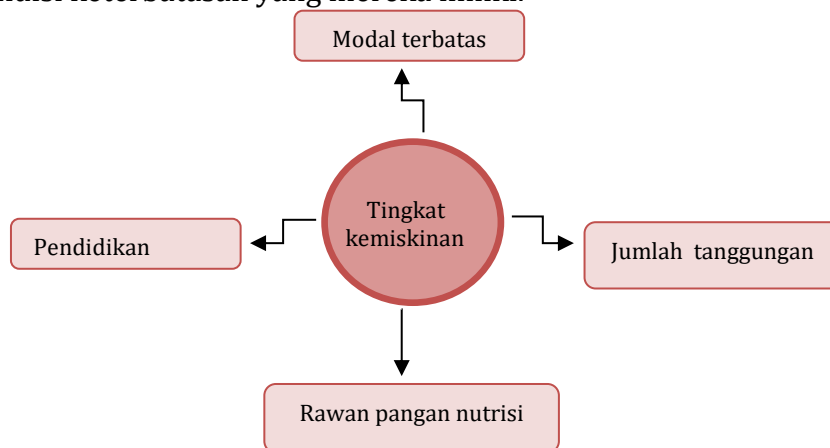


Sumber: data diolah peneliti, 2024

Gambar. 1

Persentase petani miskin Desa Aka-Akae

Berdasarkan persentase diatas, terdapat 11% petani yang tergolong miskin di Desa Aka-Akae dari total keseluruhan petani 454 orang. Petani tersebut tergolong miskin karena hanya menggarap lahan pertanian kurang dari 1 Ha sehingga penghasilannya minim dan harus membagi hasil ke pemilik tanah. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Andre Gunder Frank yaitu “ketergantungan sosial menemukan bahwa orang-orang miskin akan cenderung semakin miskin karena telah melakukan kontak hubungan dengan orang-orang kaya”. Petani miskin inilah yang rawan termarginalkan atau terdiskriminasi dalam masyarakat dan masuk kedalam keadaan terpinggirkan untuk mendapat akses atas keadilan, sebab bermacam kondisi keterbatasan yang mereka miliki.



Gambar. 2

Ciri-Ciri Kemiskinan Petani Penggarap Miskin Desa Aka-Akae

Kemiskinan petani penggarap di Desa Aka-Akae digambarkan dengan 4 ciri-ciri Hal ini didukung oleh pernyataan dari beberapa informan. *Pertama*, permodalan terbatas yang dialami petani penggarap sebagaimana jawaban Bapak S dengan lahan 80 are, mengenai pertanyaan “Apa saja kesulitan yang dihadapi saat bertani?” beliau mengatakan:

“Menreni sewana dakkalae nak, iya lao mala gaji maddompeng, loppatanengeng galukku inumae apa kode wanre gaji desiga upake tanengi, welliang solar, upagaji tanengngi. Yako massewa otoki bene na mi punna galunge ipatuo haha degga yala depi gaga racunna sibawa bibi’na makato soli, ko degga dui tumakkinrengsi jolo” (wawancara pada tanggal 22 April 2024)

(Sewa mobil traktor sekarang itu mahal nak, saya harus kerja buruh membajak sawah milik oranglain supaya punya modal untuk menyewa orang berladang (menanam padi) di sawah saya. Kalau menyewa mobil traktor itu ibaratnya saya hanya menghidupi istri pemilik sawah saya haha, penghasilan bagian saya semakin sedikit karena menyewa orang menanam belum lagi harga racun dan bibit semakin mahal dan biasanya hanya mengutang jika uang tidak cukup)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa petani penggarap kesulitan dalam permodalan untuk tanam kembali. Sebab hasil pertanian sebelumnya tidak cukup untuk membiayai segala keperluan dalam bertani dan memaksa petani melakukan kerja buruh terlebih dahulu sebelum mengerjakan

sawahnya. Penerapan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas usaha tani bukan hanya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga modal untuk menyewa input yang dibutuhkan. Selain itu, untuk mengefisiensikan pekerjaan petani butuh modal menyewa orang berladang untuk menanam padinya. Belum lagi pertimbangan petani untuk pengadaan sarana produksi (benih/bibit, pupuk dan pestisida) yang dirasakan semakin mahal harganya dan terkadang membuat petani berutang. Selain harus membayar utang yang digunakan untuk mengolah lahan persawahan, petani penggarap pun harus membagi hasil panennya dengan pemilik sawah. Sehingga permodalan terbatas menjadi salah satu penyebab petani mengalami kemiskinan.

Kedua, masalah petani miskin yang ada di desa Aka-Akae juga dilihat dari tingkat pendidikannya yang rendah, hal ini dapat dilihat dari wawancara bersama Bapak L selaku petani penggarap 70 are saat ditanyakan “Pendidikan terakhir bapak/ibu apa?” beliau mengatakan:

“Tamatang SD ma iya, ero riolo dega nasambungeng tomatoa e maperrimi lebbi lao maggalung” (wawancara pada 30 Mei 2024)

(Saya tamatan SD, itu dulu orangtua tidak punya uang untuk sekolahkan anaknya, karena uang terbatas jadi memilih bertani saja)

Sementara Ibu I, istri Bapak M selaku petani penggarap yang luas lahannya 50 are mengatakan:

“SD ka iya ipabbotting, ko lakkekku SMP, makkoroje riolo ko cauni tomatoe patuoki nasuroni botting padahal melo mopa massikola ro. Ko anakku pajani massikola SMP terakhir pekkoje passikolae ko dekke bela na degga dui yattampareng desi nalao massikola jadi paja bawammi laomi beli bapakna mannuma” (wawancara pada tanggal 30 Mei 2024)

(Saya menikah pada saat SD, kalau suami saat SMP, begitu kondisi zaman dulu karena orangtua sudah tidak mampu menghidupi padahal saya masih mau sekolah waktu itu. Kalau anak saya berhenti juga sekolah, SMP terakhir karena jarak sekolah jauh tidak ada uang dipakai ongkos jalan jadi dia memilih berhenti saja dan membantu bapaknya bertani)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dimaknai bahwa kesulitan dalam akses pendidikan menyebabkan petani penggarap hanya bisa bekerja sebagai petani yang telah turun temurun di kerjakan oleh orangtuanya. Walaupun petani mengetahui pendidikan sangat penting untuk menunjang masa depan yang lebih baik, namun hal itu dirasa tidak mampu dilakukan oleh petani sebab biaya pendidikan tidak sebanding pendapatan yang diperolehnya. Hal ini juga akan berdampak pada perekonomian desa karena jika banyak orang muda usia potensial tidak memperoleh pendidikan yang layak, pertumbuhan ekonomi akan berkurang, karena desa akan kehilangan penggerak ekonomi sebab pemudanya tidak memiliki keahlian dan keterampilan selain bertani.

Ketiga, dari observasi dan wawancara di lapangan, peneliti menemukan bahwa beberapa rumah petani penggarap di Desa Aka-Akae di huni oleh 2-3 generasi keluarga sehingga kepala keluarga menanggung kebutuhan hidup antara 2-5 orang tanggungan dalam satu keluarga, karena banyak keluarga muda yang belum memiliki rumah sehingga masih terdapat rumah yang terlihat sempit dan sesak. Berikut wawancara bersama Ibu E istri Bapak D selaku petani penggarap dengan luas 80 are saat ditanyakan “Berapa jumlah anggota keluarga ibu dirumah

ini?" beliau mengatakan:

"Iya sibolaka anakku sibawa manittukku engka tona anakna, depa kasi ga bolana jadi monromi sibawa iya'. Makkomi idi okkohe lelemi tudang-tudang degga jamang, to sidereke-reke komelo melli bale na degga dui haha, iyako biasa tomanginrengmi bale ko engkani pabbalu balewe" (wawancara pada tanggal 22 April 2024)

(Saya serumah anak dan menantuku yang juga sudah memiliki anak, kasian belum punya rumah jadi mereka tinggal bersama saya. Begitulah kami disini duduk-duduk tidak punya kerjaan, sama-sama mengeluh kalau mau beli ikan tapi tidak punya uang haha, dan biasanya mengutang ke penjual ikan keliling)

Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah tanggungan keluarga yang banyak tentunya akan menyulitkan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarganya dengan penghasilan sedikit yang diperoleh dari hasil menanam padi sehingga menjadi beban bagi para petani penggarap. Hal ini sesuai pernyataan Ahmadi (dalam Novianti, 2018) bahwa pada umumnya keluarga yang mempunyai banyak anak terdapat dalam tingkat sosial ekonomi rendah.

Keempat, kerawanan pangan dan nutrisi yang tidak terpenuhi. Pendapatan para petani penggarap yang terbatas nyatanya juga harus dikeluarkan untuk kebutuhan pangan bahkan tidak cukup untuk memenuhi nutrisi empat sehat lima sempurna. Berikut wawancara bersama Ibu I saat ditanyakan "Apakah ada kendala dalam pemenuhan kebutuhan makanan bergizi?" lalu beliau mengatakan:

"Dena yanre makkoroe idi empat sehat lima sempurna, yanresa tapi jarang, engkapa dui kalo hari-hari tidak yang penting to messo pura manre to matinrona haha, dena yeppikkiri ki ero onna, ero meni agasi yanre kobajai kodegaga na indomie meni yelli" (wawancara pada tanggal 30 Mei 2024)

(Makanan empat sehat lima sempurna itu sudah jarang dimakan, itupun kalau ada uang. Kalau untuk sehari-hari itu tidak yang penting kenyang lalu tidur haha, tidak dipikirkan lagi bergizi tidaknya, yang dipikirkan itu kalau besok makan apa kalau tidak ada kita beli saja indomie)

Sementara Bapak O selaku petani penggarap 75 are menyatakan:

"Idi komeloki manre ko poleni galung e tulaona makonta' bale okko saloe nappa itunu tunu atau inasu i ga, tumasappa jolo nappa manre" (wawancara bersama Bapak O pada tanggal 30 Mei 2024)

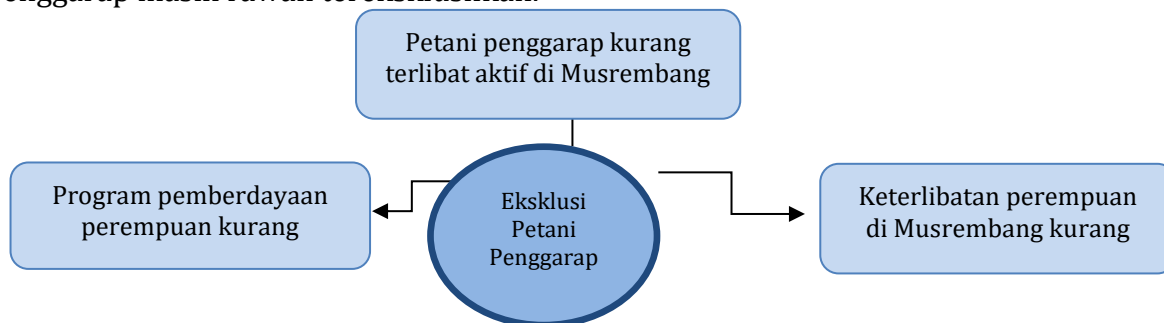
(Saya kalau mau makan setelah pulang dari sawah, pergi dulu menyetrum ikan di sungai lalu dibakar atau di masak kuah, harus cari sendiri baru makan)

Dari wawancara tersebut dapat dimaknai bahwa petani penggarap kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Walaupun jauh dari syarat makanan bergizi empat sehat lima sempurna, hal dianggap penting bagi petani adalah kebutuhan makanan terpenuhi, terlepas dari bergizi atau tidak bergizi. Dengan penghasilan yang tidak menentu memaksa petani penggarap harus menerapkan strategi survival untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini yang menjadi titik masuk dalam mengidentifikasi gambaran umum kerawanan pangan dan nutrisi tidak tercukupi pada petani penggarap miskin di Desa Aka-Akae.

Berdasarkan temuan lapangan, peneliti juga menemukan jika petani ditanya mengenai pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, dengan tegas mereka menjawab “cukup” akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah ‘cukup’ berarti tidak hutang atau berarti ada sumber lain untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dari permasalahan-permasalahan yang dialami petani penggarap tersebut, pemerintah seharusnya mempunyai peran penting dalam mengentaskan kemiskinan dan menyesuaikan kebutuhan akan kondisi petani sehingga program-program yang dilakukan mampu memenuhi kebutuhan para petani penggarap miskin. pemerintah desa dan masyarakat petani harus membangun komunikasi yang baik dalam membahas hal-hal yang dirasa penting untuk diprogramkan agar tidak ada kekeliruan atau ketidaktepatan sasaran penggunaan dana desa. Hal ini didukung oleh pernyataan Prawoto (dalam E. Gunawan dan Irawan, 2021) berpendapat bahwa untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan diperlukan penanganan dan program secara terpadu yang menyentuh seluruh faktor penyebab kemiskinan dan tidak bersifat temporer (sementara). Sebagaimana maksud dari teori *Felware State* yang menyatakan bahwa negara harus aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang.

2. Peran Dana Desa dalam Meningkatkan Inklusi Sosial Petani Penggarap

Dari hasil wawancara beberapa informan, Pasal 78 Ayat 1 terkait salah-satu tujuan dana desa yaitu meningkatkan inklusi sosial masyarakat, faktanya tidak sesuai dengan penerapan kebijakan pemerintah desa di Desa Aka-Akae. Hal ini disebabkan prioritas pemerintah desa dalam meningkatkan inklusi sosial masyarakat petani penggarap dalam pembangunan ekonomi dan sosial masih kurang, berikut ini beberapa faktor yang membuktikan bahwa masyarakat petani penggarap masih rawan tereksklusifkan.



Gambar. 3

Bentuk Eksklusi Petani Penggarap Miskin Desa Aka-Akae

Pertama, dari wawancara dapat dikatakan bahwa keterlibatan aktif petani penggarap dalam Musrembang Desa Aka-Akae masih kurang. Karena tidak semua petani penggarap diundang untuk terlibat dalam Musrembang, sehingga pemerintah desa perlu memastikan bahwa penting untuk mempertimbangkan mengundang pihak yang akan menjadi perwakilan dari petani penggarap agar benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi seluruh petani miskin. Selain itu, pemerintah desa harus memastikan bahwa proses Musrembang memberikan kesempatan bagi semua pihak, termasuk petani penggarap miskin untuk berpartisipasi aktif dan memberikan masukan yang berarti. Meskipun petani

memiliki pendidikan rendah, mereka dapat memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat miskin di desa, bahkan partisipasinya justru membantu untuk memperluas pandangan dan memasukkan perspektif yang selama ini mungkin terabaikan.

Dengan pendekatan yang inklusif, semua suara dan masukan yang diberikan oleh berbagai kelompok masyarakat miskin termasuk yang berpendidikan rendah, dapat menjadi sumber informasi berharga dalam menentukan kebijakan yang tepat. Sehingga penting bagi pemerintah desa memastikan mengadopsi strategi komunikasi yang tepat agar semua pihak berpartisipasi secara aktif serta merasa didengar dan dihargai.

Kedua, keterlibatan perempuan dari keluarga petani penggarap miskin dalam musrembang kurang. Berdasarkan wawancara dapat dikatakan bahwa beberapa perempuan di Desa Aka-Akae khususnya di kampung Bece kurang aktif dalam keterlibatan pada Musrembang desa dan tidak mengetahui fungsi dana desa untuk pemberdayaannya, sehingga dapat dimaknai bahwa istri dan anak petani penggarap miskin di Desa Aka-Akae masih terancam tereksklusifkan dalam proses perencanaan dan pembangunan desa sehingga hal ini tidak sesuai dengan UU Desa. Pemerintah desa perlu melakukan beberapa langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah gender agar perempuan merasa nyaman dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam Musrembang. Hal ini meliputi peningkatan kesadaran tentang peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan desa, memastikan ruang partisipasi yang setara, dan menyediakan akses terhadap informasi sumber daya, dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada perempuan. Sehingga hal tersebut dapat membuka peluang bagi terciptanya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

Ketiga, kurangnya program pemberdayaan bagi perempuan. Berdasarkan wawancara tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah desa memiliki beberapa kendala dalam melakukan pemberdayaan dari dana desa, yaitu kurangnya partisipasi perempuan dalam KWT (Kelompok Wanita Tani) dan tidak adanya lahan untuk bertani. Meskipun terjadi ketidakpedulian dari sebagian perempuan desa dan belum tersedianya lahan, bukan berarti bahwa pemerintah desa sebaiknya menghentikan program pemberdayaannya. Sebaliknya, pemerintah desa dapat melakukan langkah strategis untuk mengatasi situasi tersebut, contohnya melakukan pendekatan komunikasi yang lebih intensif dan efektif kepada perempuan mengenai pentingnya program pemberdayaan, selain itu pemerintah juga perlu menyesuaikan program pemberdayaan dengan kebutuhan dan minat perempuan.

Apabila anggota KWT tidak memiliki lahan, pemerintah dapat mengambil langkah lain yakni program alternatif yang sesuai minat dan potensi perempuan seperti keterampilan kerajinan, manajemen usaha, pemasaran produk. Sehingga perempuan dapat lebih mandiri dalam mencari sumber penghasilan. Pemberdayaan perempuan memiliki dampak positif yang luas bagi pembangunan desa secara keseluruhan, seperti peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi, serta perubahan sosial dan budaya yang inklusif. Sehingga pemerintah perlu mendorong partisipasi perempuan untuk tetap aktif dan produktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi keluarganya guna mencapai tujuan

pembangunan desa secara berkelanjutan sebagaimana yang terdapat pada UU Desa.

Dari tiga faktor diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi Dana Desa dalam peningkatan inklusi sosial petani penggarap di Desa Aka-Akae kurang efektif dan kurang sesuai dengan prinsip *welfare state* yang mengejar kesetaraan dan inklusi sosial. Pemerintah desa harus memastikan petani penggarap dilibatkan dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang menggunakan dana desa. Serta memberikan ruang bagi keluarga petani penggarap untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka agar program dapat lebih efektif dan relevan serta sejalan dengan prinsip *welfare state* yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan inklusi sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Dana Desa dalam Mengurangi Kemiskinan dan Meningkatkan Inklusi Sosial Petani Penggarap di Desa Aka-Akae

Faktor Pendukung

1) Kemauan dalam berpartisipasi

Bahwa mayoritas masyarakat petani penggarap di Desa Aka-Akae memiliki kemauan ikut serta dalam Musrembang dan terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat. Dimana dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan, ketika ditanyai terkait kehadiran dalam Musrembang mereka beralasan karena tidak ada panggilan dari pemerintah desa. Kemauan dalam keterlibatan aktif dan partisipasi masyarakat inilah yang akan menjadi kunci keberhasilan program dana desa.

2) Pemahaman terhadap masalah kemiskinan

Petani penggarap miskin di Desa Aka-Akae cukup mengerti akan masalah kemiskinan yang mereka alami. Dengan pemahaman tersebut, petani dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang perlu didukung oleh dana desa. Mereka dapat memberikan masukan langsung mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah mereka sehingga alokasi dana dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak.

Dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung tersebut, dana desa memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen efektif dalam mengurangi kemiskinan dan dengan pengelolaan yang baik serta pemberdayaan masyarakat desa yang kuat, sehingga dana desa dapat memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan dan inklusi sosial masyarakat petani penggarap yang masih berada dalam kondisi kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori Partisipasi Masyarakat yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan inisiatif tersebut. Keterlibatan masyarakat memungkinkan mereka untuk menyampaikan kebutuhan dan prioritas mereka, sehingga program yang dirancang lebih sesuai dengan kondisi lokal.

Faktor Penghambat

1) Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan desa yang tidak memperhatikan secara cukup mendalam aspek pengurangan kemiskinan dan inklusi sosial dapat menghambat upaya-upaya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika prioritas pembangunan desa lebih condong kepada

pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, irigasi dan lainnya tanpa memperhatikan aspek sosial dan ekonomi yang dapat mendukung pengurangan kemiskinan, maka upaya-upaya untuk kesejahteraan petani penggarap miskin dapat terabaikan.

2) Kurangnya informasi kepada masyarakat

Tanpa pemahaman yang memadai tentang fungsi dan manfaat dana desa, masyarakat desa khususnya petani penggarap dapat kurang berpartisipasi dalam proses perencanaan dana desa serta pengalokasian anggaran mungkin tidak berpihak pada kebutuhan riil masyarakat. Hal ini dapat menghambat efektivitas dan efisiensi program-program pembangunan yang dibiayai oleh dana desa, serta mengurangi dampak positifnya bagi kesejahteraan masyarakat petani penggarap.

3) Ketimpangan gender

Ketika perempuan desa tidak dilibatkan dalam Musrembang dan tidak mengetahui fungsi dana desa, ini menyebabkan peningkatan ketimpangan gender dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan partisipasi dalam pembangunan lokal. Hal ini dapat memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan di desa. Karena perempuan desa seringkali memiliki pandangan dan kebutuhan yang berbeda dari laki-laki dalam masyarakat jika tidak dilibatkan dalam Musrembang, prioritas pembangunan yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan mereka sangat mudah terabaikan.

Ketiga faktor tersebut sesuai dengan teori Pendekatan Kapabilitas (*Capability Approach*) yang dikembangkan oleh Amartya Sen bahwa kesejahteraan individu tidak hanya ditentukan oleh pendapatan atau sumber daya ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan (kapabilitas) mereka untuk mencapai fungsi-fungsi yang mereka nilai penting dalam hidup. Sehingga dengan memperhatikan faktor-faktor diatas, diharapkan peran dana desa dapat semakin efektif dalam mendukung pembangunan di tingkat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Penggunaan dana desa dalam mengurangi kemiskinan di Desa Aka-Akae terdiri dari 3 program yaitu penyuluhan pupuk organik disertai sosialisasi, bantuan beras 10 kg, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, ketiga hal tersebut masih menuai respons yang kurang baik dari petani penggarap miskin karena belum mampu mengeluarkan petani dari jerat kemiskinan. Selain itu, peran dana desa dalam meningkatkan inklusi sosial juga belum efektif karena petani penggarap masih tereksklusifkan karena kurangnya keterlibatan aktif petani penggarap dalam Musrembang, kurangnya program pemberdayaan untuk perempuan, dan kurangnya keterlibatan perempuan dalam Musrembang. Sehingga dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi sosial pada masyarakat petani penggarap masih kurang efektif dan tujuan dana desa yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta prinsip *felware state* belum terimplementasikan dengan baik.

Faktor-faktor yang mendukung peran dana desa di Aka-Akae agar dapat semakin efektif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

petani penggarap terdiri dari adanya kemauan berpartisipasi dari masyarakat petani, dan pemahaman terhadap masalah kemiskinan. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat peran dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan petani penggarap miskin yaitu terdiri dari prioritas pembangunan terfokus pada infrastruktur, kurangnya informasi kepada masyarakat, dan adanya ketimpangan gender.

SARAN

Berdasarkan analisis peran aparat pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi sosial pada petani penggarap di Desa Aka-Akae, untuk tercapainya tujuan menjadi desa yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera harus ada peningkatan dalam beberapa hal. Adapun rekomendasi atau saran dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Diharapkan aparat pemerintah desa Aka-Akae menambahkan program kegiatan yang memfokuskan kepada pemberdayaan ekonomi dengan cara mengadakan pelatihan usaha mikro, pelatihan wanita tani, atau kredit hewan ternak agar masyarakat lebih mandiri dan meningkatkan kesejahteraannya dan tidak ketergantungan pada bantuan tunai saja.
- 2) Pemerintah Desa diharapkan melakukan pengintegrasian dan pemutakhiran data masyarakat miskin dan juga data petani penggarap miskin agar lebih memudahkan dalam menjalankan program dari penggunaan dana desa.
- 3) Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan pengawasan kepada pemerintah desa untuk menghindari pemanfaatan dana desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan agar mengurangi kemiskinan di pedesaan.
3. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mendorong pelibatan kaum marginal agar mengurangi kemiskinan, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam dengan mengeksplorasi strategi penguatan partisipasi perempuan dan pemberdayaan berbasis *Gender Equality dan Social Inclusion (GESI)*, pengembangan model kebijakan desa inklusi, adopsi dan implementasi model integrasi desa inklusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Mayoritas Rumah Tangga Miskin Indonesia Hidup dari Sektor Pertanian*.
- Bappenas. (2017). Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan. *Sikompak Bappenas*. <https://sikompak.bappenas.go.id/>
- Gunawan, E., & Irawan, B. (2021). *Penanggulangan Kemiskinan Di Sektor Pertanian: Kasus Pada Program Bekerja*.
- Mandang, M., Sondakh, M. F. L., & Laoh, O. E. H. (2020). *Karakteristik Petani Berlahan Sempit Di Desa Tolok Kecamatan Tomposo*.
- Novianti, D. (2018). *Kondisi Sosek Keluarga Petani Penggarap Desa Rawi Penengahan Lampung Selatan Tahun 2016*.
- Prima Putra Budi Gutama, B. W. (2020). *Inklusi Sosial dalam Pembangunan Desa*.
- Shaw, R. M., Howe, J., Beazer, J., & Carr, T. (2020). Ethics and positionality in qualitative research with vulnerable and marginal groups. *Qualitative Research*, 20(3), 277–293.

- Seda, F. S. S. E., Kurniawan, K. N., & Pera, Y. H. T. (2023). Social Inclusion Challenges and the Future of Relational Wellbeing: The Case of Indonesia and South-Korea. *Social Indicators Research*, 165(1), 309–332.
- Reffi Anggun Cahyani, pambudi handoyo. (2024). *Strategi Bertahan Hidup Petani Penggarap (Studi Desa Simo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun)*.